



Transparansi dalam Proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta: Analisis Etika Administrasi Publik

Denisa Fadilah Aribah^{1*}, Denok Kurniasih²

^{1,2} Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2098>

*Correspondence: Denisa Fadilah Aribah

Email: denisa.aribah@mhs.unsoed.ac.id

Received: 20-10-2024

Accepted: 21-11-2024

Published: 21-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta merupakan inisiatif infrastruktur strategis yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing Indonesia. Meskipun proyek ini menjanjikan banyak manfaat, tantangan terkait transparansi, pengelolaan anggaran, dan partisipasi masyarakat menjadi isu krusial yang perlu ditangani. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis transparansi dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, komunikasi publik, dan partisipasi masyarakat dalam proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan transparansi dan partisipasi masyarakat dapat menghambat keberhasilan proyek serta menimbulkan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan, melibatkan masyarakat secara aktif, dan menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proyek dapat memberikan manfaat yang diharapkan dan mencerminkan prinsip-prinsip etika administrasi publik yang baik.

Keywords: Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Transparansi, Pengelolaan Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Etika Administrasi Publik, Infrastruktur

Pendahuluan

Proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta merupakan salah satu inisiatif infrastruktur paling signifikan di Indonesia, dilaksanakan melalui kemitraan strategis antara Indonesia dan Tiongkok. Didirikan pada 16 Oktober 2015, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dibentuk oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi waktu tempuh antara Jakarta dan Bandung, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dengan kecepatan operasional mencapai 350 km/jam, kereta cepat ini tidak hanya diharapkan mampu merevolusi pola transportasi masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai simbol modernisasi infrastruktur nasional. KCIC berperan sebagai operator *Whoosh* dan diakui sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Meskipun proyek ini menjanjikan banyak manfaat, kompleksitas dan skala besar pelaksanaannya menghadirkan berbagai tantangan, termasuk pengelolaan anggaran, dampak sosial, serta kebutuhan akan pengawasan yang efektif. Pada 2 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo meresmikan Kereta Cepat *Whoosh* di Stasiun Halim, Jakarta, menandai selesainya pembangunan proyek ini dan memperkenalkan nama baru yang

mencerminkan efisiensi dan kehandalan layanan transportasi di Indonesia. Setelah peresmiannya, *Whoosh* menawarkan perjalanan gratis kepada masyarakat melalui program *Whoosh Experience*, sebelum resmi beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023 (Fatiqa, 2024a).

Dalam konteks administrasi publik, transparansi menjadi elemen krusial yang menentukan keberhasilan proyek-proyek infrastruktur besar. Transparansi mencakup akses publik terhadap informasi yang relevan, serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Prinsip ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mencegah potensi konflik atau penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, analisis terhadap transparansi dalam proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta menjadi sangat relevan untuk mengevaluasi sejauh mana proyek ini sesuai dengan prinsip etika administrasi public (Salim, 2024).

Elahi (2009) menegaskan bahwa konsep *good governance*, yang didefinisikan oleh UNDP, mencakup empat pilar utama: partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Pilar-pilar ini dianggap esensial dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun terdapat berbagai upaya untuk mempromosikan *good governance*, sering kali hasil yang dicapai dianggap tidak memuaskan. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpuasan dalam implementasi yang mengaburkan sifat politik mendasar dari tata kelola, serta menciptakan kebingungan antara negara dan pemerintah. Sejak tahun 1990-an, *good governance* telah menjadi tema sentral dalam kebijakan pembangunan yang diusung oleh lembaga donor bilateral dan supranasional, dengan UNDP sebagai pelopor dalam diskursus ini. Meskipun investasi dan upaya signifikan telah dilakukan untuk mempromosikan *good governance*, kemajuan yang teramati sering kali lambat. Elahi mengkritisi bahwa mendefinisikan *governance* hanya sebagai proses dapat mengalihkan perhatian dari akar penyebab tantangan *governance* itu sendiri (Subhani, 2023).

Braun Dietmar & Guston David H (2003) menjelaskan bahwa dalam hubungan ini, "*principal*" sering kali terdiri dari lembaga pemerintah atau pendanaan, sementara "*agent*" adalah peneliti atau institusi yang melaksanakan penelitian tersebut. Mereka menyoroti tantangan utama yang muncul akibat asimetri informasi dan potensi konflik kepentingan, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang interaksi ini tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas kebijakan penelitian, tetapi juga mendorong akuntabilitas melalui mekanisme insentif dan evaluasi yang tepat.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis transparansi dalam proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai praktik etika administrasi publik dalam konteks pembangunan infrastruktur, serta menyarankan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek serupa di masa depan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kredibel, termasuk laporan resmi pemerintah, artikel jurnal ilmiah, dan berita dari media terpercaya. Tujuan utama penelitian adalah mengeksplorasi etika administrasi publik dalam konteks pembangunan infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dengan penekanan pada transparansi dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, komunikasi publik, dan partisipasi masyarakat. Sumber data yang dianalisis mencakup dokumen kebijakan pemerintah, hasil audit publik, serta laporan dan publikasi akademik yang relevan (Oktarina, 2023).

Proses analisis dilakukan dengan membandingkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola dan isu terkait etika administrasi publik, serta memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi proyek infrastruktur. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman praktik etis dalam administrasi publik, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Hasil and Pembahasan

1. Transparansi dalam Perencanaan Proyek

Transparansi dalam perencanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi isu sentral yang memengaruhi kepercayaan publik. Menurut penelitian oleh Dina et al. (2021), informasi yang disediakan kepada masyarakat sering kali tidak mencakup detail penting mengenai biaya, waktu pelaksanaan, dan risiko yang terkait. Keterbatasan akses informasi ini menciptakan kesan bahwa pemerintah berupaya menutupi aspek-aspek tertentu dari proyek, yang dapat menimbulkan skeptisisme di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip keterbukaan, di mana setiap tahapan perencanaan dapat diakses dan dipahami oleh public (Widodo, 2023).

Selain itu, Yamin & Windymadaksa (2017), menekankan bahwa perencanaan yang transparan tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga berkontribusi pada pengawasan yang lebih efektif. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan komprehensif, mereka dapat memberikan masukan yang konstruktif dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini akan menghasilkan proyek yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

2. Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi sorotan utama dalam analisis transparansi, terutama terkait dengan penggunaan dana publik. Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipublikasikan di Detik Finance(2023) menunjukkan adanya indikasi pemborosan dan ketidakefisienan dalam pengeluaran anggaran proyek. Beberapa pengeluaran yang tidak terencana dan tidak terduga telah menyebabkan pembengkakan biaya, yang berpotensi membebani keuangan negara dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat

dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien.

Nursalsabila et al.(2024) juga mengungkapkan bahwa ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran dapat memicu masalah serius, termasuk keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Ketika anggaran tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan proyek, yang pada gilirannya berdampak pada manfaat yang diharapkan dari proyek tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem akuntabilitas yang jelas dan transparan dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan kepada public (Fan, 2024).

3. Komunikasi Publik

Komunikasi publik yang efektif sangat penting untuk menjaga transparansi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Namun, laporan dari Tempo (2022), menunjukkan bahwa banyak masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai kemajuan proyek. Ketidakpuasan ini muncul karena informasi yang disampaikan oleh pemerintah sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam hal ini, strategi komunikasi yang lebih inklusif dan responsif sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat (Fatiqa, 2024b).

Yurianto & Kadri Trihono (2020) menekankan bahwa komunikasi yang jelas dan terbuka dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam dialog terbuka mengenai kemajuan proyek, pemerintah dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan proyek. Oleh karena itu, penting bagi pemangku kepentingan untuk mengembangkan saluran komunikasi yang efektif dan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi secara luas.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tampaknya masih minim, yang dapat menghambat keberhasilan proyek secara keseluruhan. Farizki, (2016) mencatat bahwa masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, meskipun proyek ini berdampak langsung pada kehidupan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek sangat penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi kebutuhan lokal dan mendapatkan dukungan dari komunitas. Tanpa partisipasi yang signifikan, proyek berisiko menghadapi resistensi dari masyarakat yang merasa diabaikan.

Nurjannah & Suyatno (2024) juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi proyek, tetapi juga dapat mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan konsultasi, pemerintah dapat mengumpulkan masukan yang berharga yang dapat meningkatkan desain dan pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sangat penting untuk mencapai hasil yang lebih baik dan mengurangi konflik sosial.

5. Dampak Ketidaktransparanan

Ketidaktransparanan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat berdampak negatif pada berbagai aspek, termasuk lingkungan dan sosial. Pada berita yang ditulis oleh Nugraha (2016), menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam proses AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan dampak lingkungan yang merugikan. Ketidakjelasan dalam informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang risiko yang mungkin timbul dari proyek, sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, berita lainnya juga yang ditulis oleh Arifianto (2023) mengindikasikan bahwa ketidaktransparanan dapat mengakibatkan meningkatnya konflik sosial terkait proyek, yang berpotensi menghambat kemajuan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan dan tidak mendapatkan informasi yang cukup, mereka mungkin akan mengekspresikan ketidakpuasan melalui protes atau aksi lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi untuk mencegah potensi konflik dan memastikan bahwa proyek dapat dilaksanakan dengan lancar..

Simpulan

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) merupakan inisiatif penting yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas di Indonesia. Namun, analisis mengenai transparansi dalam proyek ini menunjukkan sejumlah tantangan yang harus diatasi untuk memastikan keberhasilan dan penerimaan publik. Keterbatasan dalam transparansi perencanaan, pengelolaan anggaran yang kurang efisien, serta komunikasi publik yang tidak memadai telah menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang minim dalam setiap tahap proyek juga menjadi faktor yang menghambat legitimasi dan dukungan terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Selain itu, dampak ketidaktransparanan tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menyebabkan konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan keterbukaan, melibatkan masyarakat secara aktif, dan menerapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dengan langkah-langkah ini, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat dilaksanakan dengan lebih baik, memberikan manfaat yang diharapkan, dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Sehingga dengan adanya peningkatan transparansi dan partisipasi, diharapkan proyek ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip etika administrasi publik yang baik.

Daftar Pustaka

- Afriyadi, A. D. (2023, June 21). *BPK Bongkar Pemborosan Keuangan Negara hingga Bengkok Kereta Cepat*. Detik Finance.
- Arifianto, B. (2023, October 6). *Dampak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Amdal Kejar Proyek dan Dugaan Pelanggaran HAM*. Pikiran Rakyat.
- BPK. (n.d.). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Pemerintah Pusat Tahun 2022*.
- Braun Dietmar, & Guston David H. (2003). *Principal-Agent Theory and Research Policy: An Introduction*.
- Desakan Transparansi Proyek Sepur Kilat*. (2022). Tempo.
- Dina, O., Della Menanda, I., Anugrah Pratama, I., Meta Ramadhani, K., Sumiati, M., Administrasi Negara FISIP Universitas Al-Ghifari Bandung, D., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2021). *Perspektif Ekologi Administrasi: Pembangunan Insfrastruktur Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung* (Vol. 2, Issue 1).
- Elahi, K. Q. I. (2009). UNDP on good governance. *International Journal of Social Economics*, 36(12), 1167–1180. <https://doi.org/10.1108/03068290910996981>
- Fan, X. (2024). Analysis of Shield Tunneling Parameters and Research on Prediction Model of Tunneling Excavation Speed in Volcanic Ash Strata of Jakarta–Bandung High-Speed Railway Project. *Applied Sciences (Switzerland)*, 14(11). <https://doi.org/10.3390/app14114623>
- Farizki, F. A. (2016). *Analisis Dampak Pembangunan Kereta Cepat Bandung Jakarta*.
- Fatiqa, I. A. (2024a). Analysis of Safety Performance in the Jakarta Bandung High Speed Railway Project. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 7(4), 975–984. <https://doi.org/10.56338/mppki.v7i4.4721>
- Fatiqa, I. A. (2024b). Analysis of Safety Performance in the Jakarta Bandung High Speed Railway Project. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 7(4), 975–984. <https://doi.org/10.56338/mppki.v7i4.4721>
- Nugraha, I. (2016, January 18). *Amdal Kereta Api Cepat Bandung-Jakarta Dinilai Banyak Kelemahan*. Mongabay.
- Nurjannah, G., & Suyatno. (2024). Kerjasama Investasi antara Pemerintah Pusat dan Badan Usaha Kereta Cepat Jakarta Bandung. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Nursalsabila, A., Arifani, D. A., & Naila, T. A. (2024). *Kerjasama Indonesia-China Dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Tantangan, Dampak, dan Dukungan Masyarakat*. 2(1), 75–79. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/sjim>
- Oktarina, I. M. A. (2023). Engineering Geological Investigations for Determination of Rock Mass Quality and Estimation of Stand-Up Time of Tunnel Number 8, The Jakarta-Bandung High-Speed Railway. *AIP Conference Proceedings*, 2598. <https://doi.org/10.1063/5.0126581>

-
- Salim, I. P. (2024). Model of cost management for the Jakarta Bandung High Speed Railway Project. *Proceedings of Institution of Civil Engineers: Management, Procurement and Law*. <https://doi.org/10.1680/jmapl.24.00017>
- Subhani, P. M. (2023). Influence of operational speed and tunnel length on piston wind characteristics in Jakarta-Bandung high-speed railway project. *AIP Conference Proceedings*, 2749(1). <https://doi.org/10.1063/5.0136241>
- Widodo. (2023). Dynamic Slope Stability Subject to Blasting Vibrations: a Case Study of the Jakarta-Bandung High-Speed Railway Tunnel. *Transportation Infrastructure Geotechnology*, 10(5), 774–794. <https://doi.org/10.1007/s40515-022-00242-6>
- Yamin, M., & Windymadaksa, S. (2017). Pembangunan Kereta Cepat Jarta-Bandung Sebagai Mercusuar Hubungan Indonesia-Tiongkok. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2). <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politikinternasional/324-memaknaitahun->
- Yurianto, & Kadri Trihono. (2020). *Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Proyek Infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Bandung*.